



RISALAH KEBIJAKAN

Nomor 04, April 2024



Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Bahasa Inggris di Satuan Pendidikan

Ringkasan

- Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang belum mewajibkan pengajaran bahasa Inggris dalam kurikulum SD.
- Hasil survei menunjukkan mayoritas kepala sekolah dan guru setuju penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib pada SD dan berharap penerapannya dilakukan secara bertahap.
- Hasil tes kompetensi bahasa Inggris guru menunjukkan sebagian besar guru SD belum mencapai level *intermediate*, sedangkan sebagian besar guru bahasa Inggris SMP, SMA, dan SMK berada pada level *intermediate* ke atas.
- Diperlukan strategi peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris melalui pelatihan dan standardisasi kemampuan bahasa Inggris melalui sertifikasi yang diakui secara internasional.

Konteks

Dalam konteks hubungan internasional, bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa yang paling dominan dan tersebar luas di seluruh dunia, menjadikannya bahasa utama yang digunakan dalam komunikasi global. Dalam era globalisasi, bahasa Inggris menjadi bahasa bisnis, ilmu pengetahuan, teknologi, dan diplomasi yang dominan. Dominasi bahasa Inggris dalam hampir semua aspek kehidupan menjadikan kemampuan berbahasa Inggris sebagai kebutuhan (Nuraeni, 2021; Mika dkk, 2023). Penguasaan bahasa ini memungkinkan peserta didik memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber informasi dan dapat mengikuti perkembangan teknologi, serta berkontribusi dalam inovasi global. Peserta didik dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik memiliki peluang lebih besar untuk mengejar pendidikan tinggi di lembaga-lembaga bergengsi. Kemampuan berbahasa Inggris juga merupakan nilai tambah untuk bersaing dalam lingkungan kerja yang kompetitif.

Meskipun demikian, Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang belum mewajibkan mata pelajaran bahasa Inggris di jenjang SD. Pembelajaran bahasa Inggris di jenjang SD masih bersifat pilihan, sehingga masih ada satuan pendidikan yang tidak menerapkannya. Selain itu, belum terdapat juga peraturan atau ketentuan terkait persyaratan minimal kompetensi guru bahasa Inggris di Indonesia. Di negara-negara Asia Tenggara, persyaratan keterampilan bagi guru bahasa Inggris menjadi perhatian di dalam kebijakan pendidikan. Negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam telah menetapkan persyaratan keterampilan bahasa Inggris bagi guru-guru yang mengajar di satuan pendidikan (Zein, 2017). Persyaratan tersebut seperti yang tergambar pada Tabel 1.

Tabel 1 Persyaratan keterampilan bahasa Inggris di Asia Tenggara

Negara	Persyaratan Guru Bahasa Inggris
Malaysia	<ul style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan minimum C1 pada tes CEFR atau nilai minimal 5 pada tes MUETMemiliki pendidikan minimal S1 dari berbagai latar belakang bidang studi
Singapura	<ul style="list-style-type: none">Memiliki skor 5,5 pada tes IELTS atau tes yang sejenis (untuk PAUD/setingkat PAUD)Memiliki pengalaman paling sedikit 120 jam pada sertifikasi TEFL
Filipina	<ul style="list-style-type: none">Memiliki nilai minimum 7,5 (untuk mengajarkan IELTS)Memiliki pengalaman minimal 120 jam pada sertifikasi TEFL
Thailand	<ul style="list-style-type: none">Skor TOEFL tidak boleh lebih rendah dari 40Skor TOEIC minimal 600 atau lebih tinggiSkor IELTS minimal 5 atau lebih tinggiTermasuk dalam kategori setidaknya B1 (untuk jenjang pendidikan dasar) dan B2 (untuk jenjang pendidikan menengah) pada CEFR
Kamboja	<ul style="list-style-type: none">Memiliki pengalaman minimal 120 jam pada sertifikasi TEFLMinimum skor pada tes IELTS akademik 6,5
Laos	<ul style="list-style-type: none">Memiliki sertifikasi TEFLMemiliki skor minimum 79 pada TOEFL iBTMemiliki skor minimum 6 pada tes IELTS
Vietnam	<ul style="list-style-type: none">Skor IELTS paling rendah 6,5 atau lebih tinggiSetidaknya masuk dalam kategori B2 (untuk jenjang SD dan SMP) and C1 (untuk jenjang SMA/K sederajat) pada CEFR.

Berbagai kondisi yang menunjukkan belum idealnya pembelajaran bahasa Inggris ini berdampak pada tren penguasaan bahasa Inggris peserta didik yang semakin menurun. Jika melihat hasil Ujian Nasional pada tingkat SMP dan SMA selama tahun 2015-2019, sebelum diterapkannya Asesmen Nasional, nilai ujian bahasa Inggris cenderung mengalami tren penurunan. Dalam periode lima tahun tersebut, nilai ujian bahasa Inggris tingkat SMP secara rata-rata turun sebesar 4,8% sementara di tingkat SMA terjadi penurunan sebesar 5,8% (Pusat Penilaian Pendidikan, 2019).

Diperlukan strategi untuk dapat mendukung penguasaan bahasa Inggris khususnya bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui optimalisasi penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris di satuan pendidikan sejak jenjang pendidikan dasar. Permendikbud 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah telah mengatur bahwa sejak tahun ajaran 2024/2025 s.d. 2026/2027 bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan, kemudian beralih menjadi mata pelajaran wajib pada tahun ajaran 2027/2028 untuk sekolah dasar/ sederajat. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) bekerja sama dengan berbagai pihak telah melakukan kajian mengenai penerapan mata pelajaran bahasa Inggris di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kajian ini dilakukan pada akhir 2022 dan awal 2023 dengan menggunakan pendekatan *mixed methods* (metode campuran), yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif difokuskan pada variabel aspek penerapan, aspek penyiapan guru dan tenaga kependidikan, serta aspek metode pembelajaran. Untuk pendekatan kuantitatif, beberapa aspek sama dengan kualitatif, namun dilengkapi juga dengan penilaian kompetensi guru melalui tes. Data kualitatif dikumpulkan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (Diskusi Kelompok Terpimpin/DKT), sedangkan data kuantitatif dikumpulkan melalui survei dengan cara pengisian kuesioner daring dan tes menggunakan aplikasi EnglishScore.

Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap yaitu pada akhir 2022 dan awal 2023. Pada 2022, pengumpulan data dilakukan di enam kabupaten/kota, yaitu Kota Surabaya, Kab. Sampang, Kota Makassar, Kab. Barru, Kab. Bulungan, dan Kab. Nagekeo dengan total sampel 492 satuan pendidikan tingkat SD. Pada 2023, pengumpulan data dilakukan di empat kabupaten/kota, yaitu Kota Samarinda, Kota Ternate, Kab. Lombok Barat, dan Kab. Bandung Barat dengan total sampel 396 satuan pendidikan tingkat SMP, SMA, dan SMK.

Temuan #1: Penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD dipengaruhi kesiapan sekolah dan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam Kepmendikbud No. 262 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, mata pelajaran bahasa Inggris pada tingkat SD merupakan mata pelajaran pilihan. Hal ini berarti bahwa mata pelajaran bahasa Inggris di tingkat SD tidak diwajibkan untuk diajarkan di setiap satuan pendidikan, namun diperbolehkan bagi satuan pendidikan yang sudah siap untuk memberikan mata pelajaran bahasa Inggris di sekolahnya.

Hasil survei dengan responden kepala sekolah menunjukkan, sebanyak 45,4% satuan pendidikan menyatakan telah menerapkan pembelajaran bahasa Inggris. Sebanyak 43,8% satuan pendidikan yang telah menerapkan pembelajaran bahasa Inggris menyatakan bahwa keputusan mereka menyediakan pembelajaran bahasa Inggris adalah karena inisiatif satuan pendidikan. Sementara itu, 28,6% responden menyatakan adanya instruksi dari kebijakan daerah yang mewajibkan penerapan pembelajaran bahasa Inggris.

Hasil DKT juga menunjukkan bahwa penerapan bahasa Inggris baik sebagai mata pelajaran wajib maupun muatan lokal, terbatas pada satuan pendidikan tertentu saja yang merasa sudah siap. Penerapan juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah yang mewajibkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SD.

Untuk satuan pendidikan yang belum menerapkan pembelajaran bahasa Inggris, alasan utama yang dikemukakan adalah karena tidak adanya guru bahasa Inggris. Selain itu, terdapat juga sekolah yang masih belum menjadikan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran prioritas.

Temuan #2: Mayoritas kepala sekolah dan guru menyetujui rencana kebijakan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD dengan penerapan secara bertahap.

Hasil survei menunjukkan bahwa 96% responden kepala sekolah mengakui pentingnya pengajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum. Sementara, 95% responden guru juga menyatakan setuju terhadap rencana kebijakan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD.



Gambar 1 Persepsi Kepala Sekolah dan Guru terkait Penerapan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di SD

Mayoritas kepala sekolah dan guru setuju dengan kebijakan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SD/ sederajat. Sejalan dengan itu, hasil DKT juga mengungkap bahwa guru mendukung serta menyambut baik jika mata pelajaran bahasa Inggris diterapkan sebagai mata pelajaran wajib di SD/ sederajat, karena dapat mempersiapkan peserta didik menghadapi era globalisasi. Meski demikian, terdapat beberapa kekhawatiran di kalangan guru, antara lain (1) jumlah jam pelajaran yang akan bertambah, (2) kompetensi dan status guru yang belum memadai, (3) keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran mapel Bahasa Inggris, serta (4) masih sedikitnya pembelajaran bahasa Inggris yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik.

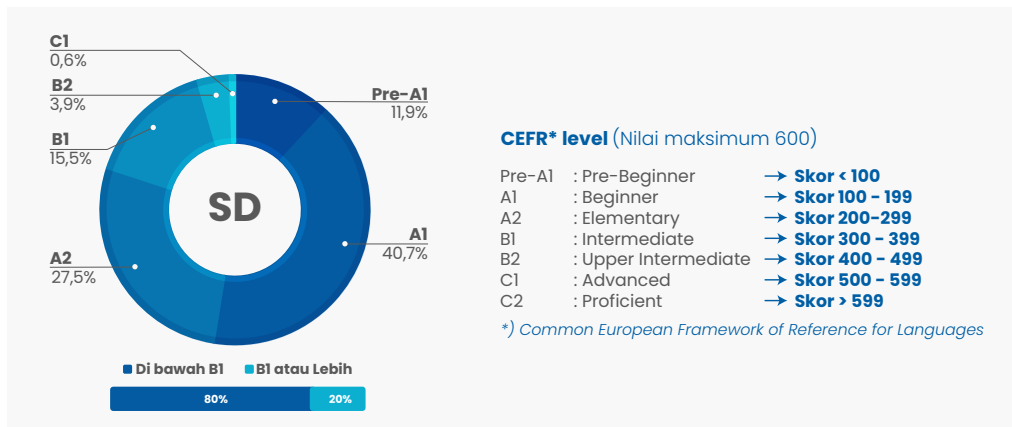
Selain itu, guru juga setuju bahwa bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib perlu segera diimplementasikan secara bertahap. Para guru mengakui beberapa manfaat signifikan yang mungkin dihasilkan dari kebijakan ini. Salah satunya adalah kemampuan berbahasa Inggris yang memadai bagi lulusan SD, yang memungkinkan mereka mengikuti berbagai kompetisi dan memperkuat minat belajar bahasa Inggris. Pengajaran bahasa Inggris sejak dini di SD juga dipandang esensial untuk membentuk dasar kemampuan berbahasa yang akan berperan penting dalam pendidikan di tingkat selanjutnya.

Temuan #3: Penyediaan guru dan kompetensi guru merupakan tantangan dalam mengimplementasikan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SD.

Meskipun guru-guru siap dan bersedia mengajarkan bahasa Inggris, jika tanpa payung hukum yang jelas maka guru berpotensi sulit bertahan dalam jangka panjang. Pengakuan linieritas bagi guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di SD menjadi kendala utama dalam menyelenggarakan pengajaran yang optimal. Hal ini karena dalam regulasi belum diatur tentang pengakuan linieritas guru mata pelajaran bahasa Inggris di tingkat SD. Hal ini berdampak tidak diakuinya beban mengajar mapel bahasa Inggris bagi guru yang mengajar di SD.

Menugaskan guru bahasa Inggris dari jenjang lain (SMP/SMA/SMK) untuk mengajar bahasa Inggris di SD dapat menjadi solusi kesiapan penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SD. Untuk itu, perlu regulasi untuk mendukung linieritas guru SMP dan SMA/SMK sebagai pengajar bahasa Inggris di tingkat SD atau sebaliknya. Namun, setiap guru yang akan mengajar bahasa Inggris di tingkat SD harus mempunyai kompetensi mengajar *English for Young Learners*.

Terkait kompetensi guru SD dalam mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris, hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 70% guru menyatakan mampu menguasai materi pembelajaran bahasa Inggris serta mengajarkannya kepada peserta didik SD. Meskipun demikian, hasil tes bahasa Inggris menunjukkan kemampuan bahasa Inggris guru masih rendah. Hanya terdapat 20% guru SD yang menunjukkan level kemampuan B1 ke atas.



Gambar 2 Nilai tes kemampuan bahasa Inggris guru SD

Hasil tes kemampuan bahasa Inggris guru tersebut didapat dengan menggunakan aplikasi EnglishScore. Tes EnglishScore menguji kemampuan bahasa Inggris guru secara umum. Dari Gambar 2 terlihat bahwa kompetensi bahasa Inggris guru yang belum layak mengajar sekitar 80%, dengan level kemampuan kurang dari B1. Untuk itu, perlu memastikan peningkatan kompetensi guru dalam persiapan sekolah mengimplementasikan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SD.

Temuan #4: Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SD diharapkan dimulai pada kelas 3 dan diterapkan secara bertahap.

Perspektif guru dan kepala sekolah mengenai tingkatan kelas yang tepat untuk memulai penerapan bahasa Inggris bervariasi dan didasarkan pada beragam pertimbangan. Beberapa pendapat mengarah pada penerapan di fase awal, yaitu fase A, yang mencakup kelas 1 dan 2. Hal ini karena pandangan bahwa pada fase ini, peserta didik memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam menyerap pengenalan dan pembiasaan bahasa asing. Guru-guru yang mendukung penerapan pada fase ini berpendapat bahwa pembelajaran dari usia dini akan lebih memudahkan anak-anak beradaptasi dengan bahasa asing. Namun, tantangannya adalah menciptakan teknik pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi potensi kebingungan pelafalan bahasa Inggris, tidak mendistraksi dari pembelajaran bahasa Indonesia maupun bahasa ibu, dan asesmen yang efektif dalam mengukur kemajuan bahasa peserta didik, terutama di kelas awal.

“Di sekolah kami pelajaran bahasa Inggris diberikan mulai kelas 3, karena kelas 1 dan 2 masih menguatkan literasinya. Penekanan pelajarannya masih pada speaking, membaca diajari per kata dulu, sampai mereka memahami. Jika dipaksakan akan terlalu berat bagi anak-anak, karena sebelumnya tidak mengenal sama sekali.” (Guru SD, Kab. Bulungan)

Sementara mayoritas guru lainnya berpandangan bahwa penerapan sebaiknya dimulai pada fase B, yang dimulai pada kelas 3. Alasannya, peserta didik pada fase ini telah memiliki kesiapan membaca dan menulis bahasa Indonesia yang lebih baik, sehingga lebih siap dalam menghadapi materi bahasa asing yang lebih kompleks. Selain itu, fase A dianggap lebih baik untuk difokuskan pada belajar calistung dan bahasa Indonesia, sehingga bahasa Inggris baru bisa diterapkan pada kelas 3 atau fase B. Senada dengan pendapat tersebut, para akademisi juga menyarankan bahasa Inggris mulai diterapkan pada fase B (kelas 3), karena anak-anak baru beradaptasi dengan bahasa Indonesia di fase A (kelas 1 dan 2).

Terkait dengan kapan mulai diwajibkan untuk seluruh SD menerapkan bahasa Inggris, responden menyatakan bahwa penerapan bahasa Inggris di tingkat SD sebaiknya dilakukan dengan segera. Lebih dari 85% kepala sekolah yang menjadi responden menyatakan tahun ajaran 2024/2025 adalah waktu yang tepat untuk menerapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib. Namun, hasil diskusi menginginkan penerapannya secara bertahap.

“Implementasi kewajiban bahasa Inggris perlu bertahap dan mencontoh implementasi Kurikulum Merdeka, sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan, jangan serentak.”
(Kepala SD, Kota Surabaya)

Tanpa mengurangi semangat dari para guru dan kepala sekolah untuk menerapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SD, penerapan ini sebaiknya dilakukan dengan segera secara bertahap untuk memastikan satuan pendidikan memiliki kapasitas yang diperlukan. Artinya, sekolah yang sudah siap dari segi ketersediaan guru, kompetensi guru, serta perangkat ajar pendukung lainnya dapat dengan segera menerapkan pembelajaran bahasa Inggris.

Temuan #5: Perlunya ditetapkan ambang batas minimum tingkat kemahiran bahasa Inggris untuk guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris.

Pembelajaran bahasa Inggris merupakan pembelajaran yang memperkenalkan bahasa asing di dalam kelas. Untuk dapat mengajarkan bahasa ini di dalam proses pembelajaran, guru harus mampu mengenalkan tidak hanya materi pelajaran, tetapi juga keterampilan *speaking, listening, reading, writing*, maupun keterampilan *grammar*. Sebelum dapat mengajarkan keterampilan bahasa Inggris tersebut, guru dituntut sudah menguasainya terlebih dahulu. Dibutuhkan keterampilan bahasa Inggris yang mumpuni untuk dapat menunjang proses pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu, diperlukan ambang batas tingkat kemahiran bagi guru untuk dapat mengajar melalui bahasa Inggris (Tamah & Lie, 2019).

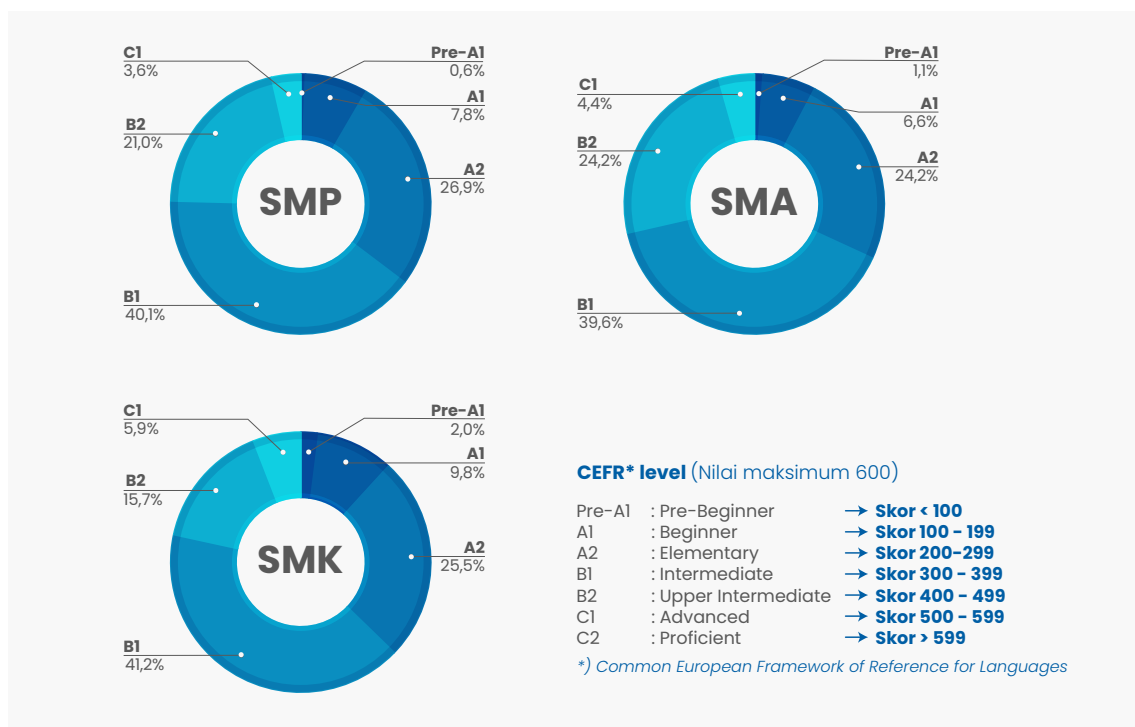
Seperti yang sudah disebutkan pada bagian konteks, meskipun negara-negara di Asia Tenggara telah menetapkan syarat keterampilan bahasa Inggris bagi guru-guru yang mengajar bahasa Inggris di sekolah, Indonesia masih belum memiliki bentuk kebijakan yang sama. Tidak terdapat skor minimum atau keterampilan minimum yang harus dikuasai oleh guru-guru bahasa Inggris untuk dapat mengajar bahasa Inggris di kelas.

Kebijakan persyaratan minimal terhadap keterampilan bahasa Inggris di Indonesia justru terdapat pada capaian pembelajaran peserta didik di sekolah. Pada pembelajaran bahasa Inggris umum di fase E dan F (SMA/MA/Program Paket C), pembelajaran bahasa Inggris berfokus pada penguatan berbahasa lisan dan tulisan dengan target CEFR B1. Penyusunan standar kompetensi guru bahasa Inggris dapat merujuk pada Capaian Pembelajaran (CP) kompetensi bahasa Inggris lulusan peserta didik di Indonesia. Idealnya, guru memiliki kompetensi yang lebih tinggi dari kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Jika lulusan SMA/ sederajat mempunyai target lulusan CEFR B1, maka paling tidak gurunya mempunyai kompetensi di B2/C1.

Temuan #6: Guru SMP/SMA/SMK sederajat yang mempunyai kompetensi kemahiran bahasa Inggris di atas B1 masih kurang dari 40%.

Selain kemampuan pedagogis, guru bahasa Inggris SMP/SMA/SMK juga perlu dibekali dengan kemampuan bahasa Inggris yang lebih mumpuni. Hasil survei menyebutkan bahwa guru SMP/SMA/SMK merasa menguasai materi yang diajarkan. Survei kepada guru bahasa Inggris SMP/ SMA/SMK menunjukkan bahwa 77,2% merasa menguasai materi pelajaran bahasa Inggris. Sedangkan, hanya sedikit di antaranya (13,9%) yang merasa tidak menguasai, sekitar 8,3% merasa sangat menguasai, dan 0,6% merasa sangat tidak menguasai.

Namun demikian, berdasarkan hasil tes EnglishScore, sebagian besar responden guru bahasa Inggris di tingkat SMP/SMA/SMK masih berada di level kemampuan B1 (*Intermediate*) ke bawah. Sementara guru yang mencapai level kemampuan B2 ke atas masih kurang dari 40%. Di tingkat SMP, guru dengan level kompetensi di atas B1, yaitu level B2 dan C1, sebesar 35%. Sedangkan di tingkat SMA sebesar 32%, dan di tingkat SMK sebesar 37%.



Gambar 3 Nilai tes kemampuan bahasa Inggris guru bahasa Inggris SMP, SMA, dan SMK

Pada Kurikulum Merdeka, target capaian pembelajaran siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris umum di fase E dan F (SMA) adalah level B1. Dalam hal ini, seharusnya guru memiliki kompetensi di atas target capaian kompetensi siswa. Namun, berdasarkan hasil tes (Gambar 3), guru SMA yang mempunyai kompetensi di atas B1 (B2 dan C1) hanya 32%. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru bahasa Inggris, baik guru yang mengajar pada tingkat SD, SMP, maupun SMA.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan di atas, studi ini mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran bahasa Inggris.

1. Satuan pendidikan SD
 - a. Jangka pendek (1-2 tahun). Pertama, pemerintah perlu menyusun buku teks pembelajaran dan modul ajar bahasa Inggris yang sesuai dengan setiap fase pembelajaran, terutama fase B serta fase C. Kedua, perlu diadakan pelatihan intensif bagi guru yang akan mengajar bahasa Inggris, baik kompetensi bahasa Inggris secara umum maupun kompetensi *English for Young Learners*. Apabila standar memang perlu dikembangkan sebagai acuan penjaminan mutu pada LKP, maka Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) merupakan dua standar esensial yang dapat dipertimbangkan. Adapun standar-standar yang lain bersifat sekunder dan tidak harus diatur secara khusus.
 - b. Jangka menengah (2-3 tahun). Pertama, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perangkat ajar bahasa Inggris, mulai dari CP, modul ajar, sampai pada buku teks. Hal ini untuk memastikan kesesuaian, efektivitas, dan responsivitas perangkat ajar terhadap perkembangan peserta didik dan dinamika kurikulum yang berkembang. Kedua, disarankan untuk memberikan pelatihan berbasis aplikasi pembelajaran digital kepada guru-guru bahasa Inggris di tingkat SD.
 - c. Jangka panjang (>3 tahun). Pertama, menerapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD, hal ini merupakan kelanjutan yang terpadu dari rekomendasi kebijakan dalam jangka pendek dan menengah. Kedua, dalam upaya mengembangkan kualitas pengajaran, direkomendasikan untuk melakukan standarisasi kompetensi pengajar bahasa Inggris di SD. Hal ini dapat dicapai dengan mewajibkan sertifikasi yang diakui internasional, seperti TOEFL, IELTS, TEFL, atau sertifikasi serupa, sebagai persyaratan bagi guru-guru yang mengajar bahasa Inggris.
2. Satuan pendidikan SMP dan SMA/SMK
 - a. Jangka pendek (1-2 tahun). Pertama, pemerintah melengkapi modul ajar agar lebih bervariasi dengan berfokus pada metode pembelajaran yang aplikatif/praktik. Kedua, perlu diadakan pelatihan intensif, terutama bagi guru yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang masih rendah.
 - b. Jangka menengah (2-3 tahun). Pertama, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perangkat ajar bahasa Inggris mulai dari CP, modul ajar, maupun buku teks. Hal ini untuk memastikan bahwa materi ajar tetap relevan, mengikuti perkembangan budaya dan teknologi, serta memberikan pemahaman mendalam bagi peserta didik. Kedua, disarankan untuk memberikan pelatihan berbasis aplikasi pembelajaran digital kepada guru-guru bahasa Inggris.
 - c. Jangka panjang (>3 tahun), penting untuk memiliki guru-guru yang berkualifikasi tinggi dan memiliki kompetensi bahasa yang kuat untuk mengajar bahasa Inggris. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi kompetensi pengajar melalui sertifikasi yang diakui secara internasional, seperti TOEFL, IELTS, TEFL, atau sertifikasi serupa.

Daftar Pustaka

- Mika, M.A., & Mardiana, N. (2023). Edukasi pentingnya bahasa Inggris di era globalisasi. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (1), 246-251.
- Nuraeni, S. P. (2021). Bahasa Inggris di era globalisasi. *Dalam Teori & Inovasi Pendidikan Masa Depan*. CV. Syahadah Creative Media.
- Pusat Penilaian Pendidikan. (2019). *Capaian Nasional Rata-Rata Hasil UN Tahun Pelajaran 2015-2019*. <https://hasilun.pusmenjar.kemdikbud.go.id>
- Tamah, S. M., & Lie, A. (2019). Analysis of a research instrument to map English teachers' proficiency. *Indonesian Journal of English Education*, 6(1), 48-64.
- Zein, S. (2017). Access policy on English language education at the primary school level in the ASEAN Plus Three member states: Motivations, challenges and future directions. *Asian Englishes*, 19 (3), 197-210. <https://doi.org/10.1080/13488678.2017.1389063>

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari kajian yang dilakukan oleh
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827



Tim Penyusun

Relisa
Ikhyia Ulumudin
Asma Aisha
Sisca Fujianita
Mutiarra Helga
Etty Sisdiana
Rizky Adhi R.